



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **USMAN**
2. Jabatan : **ANGGOTA DPRD**
3. NHK : **196306**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **8.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m²/182 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/180 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 344 m²/344 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **389.300.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 28.900.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.400.000
4. MOBIL, SUZUKI IGNIS AUTOMATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 204.000.000
5. MOBIL, TOYOTA G / CALYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **995.000.000**

D. SURAT BERTAHAP Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **767.076.797**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **10.151.376.797**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

10.151.376.797

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.